

PROSPEKTIF BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Muljadi

Dosen Program studi Manajemen FE Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email : moeljadi72@gmail.com

Abstrak

Di akui atau tidak bahwa problematika ekonomi terbesar terletak pada masalah kemiskinan. Kemiskinan bersifat multi dimensi, karena di dalamnya termasuk, aspek sosial, budaya, bahkan agama. Berbicara kemiskinan erat kaitannya dengan upaya pemerataan pendapatan. Pemerintah telah membuat beberapa penanggulangan kemiskinan dengan III klaster, klaster I tentang menyiapkan pelayanan dasar, klaster II pemberdayaan masyarakat dan klaster III penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR). BMT merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang berkembang dimasyarakat Indonesia. Lembaga keuangan ini telah terbukti dapat memberdayakan masyarakat kelas paling bawah (grass root) secara signifikan. Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang sasarannya pada ekonomi rakyat berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil. Tujuan utamanya meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan. Prospek Baitul Maal Wat Tamwil yang menggunakan konsep syari'ah kian bersinar di Indonesia, sebab BMT mampu menarik perhatian masyarakat bahkan lembaga keuangan Internasional.

Kata Kunci : Kemiskinan, pemberdayaan, prospek BMT

PENDAHULUAN

Ekonomi konvensional pada dasarnya berpijak pada filosofi positivisme yang mendewakan *power of rationality*. Pendewaan terhadap kekuatan rasionalitas ini memiliki dampak pada tergesurnya nilai-nilai etika dan moral yang bersifat teologi (Muhammad, 2008). Sedangkan dalam kajian Islam, ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya (Misanam, 2012). Kegiatan atau aktivitas ekonomi inilah yang sebenarnya menentukan jalannya proses kehidupan sebuah Negara dalam mengatur rumah tangganya. Apabila kegiatan ekonomi sebuah Negara berjalan baik, maka kehidupan masyarakatnya pun dapat mengikuti dengan sendirinya. Indonesia adalah Negara berkembang, krisis telah meluluhlantakkan Indonesia dari Negara yang tumbuh menjadi terpuruk, sejak itu tingkat kemiskinan semakin meningkat karena semua harga kebutuhan rumah tangga warga negara naik bak meteor, susah mengendalikannya. Mekanisme pasar yang berlaku tidak dapat di hindari, Indonesia sebagai Negara yang berhubungan dengan Negara lain tidak terlepas dari mekanisme pasar sempurna (equilibrium).

Di akui atau tidak bahwa problematika ekonomi terbesar terletak pada masalah kemiskinan. Kemiskinan bersifat multi dimensi, karena di dalamnya termasuk, aspek sosial,



*Jurnal Perilaku
Dan Strategi
bisnis*

Vol.1 No.1, 2013

Hal. 62 – 69

budaya, bahkan agama. Berbicara kemiskinan erat kaitannya dengan upaya pemerataan pendapatan. Kemiskinan bisa timbul karena adanya sebagian daerah yang belum dapat secara penuh tertangani, sehingga menjadi terisolasi, adanya daerah atau sektor yang harus menampung tenaga kerja yang melimpah sedangkan tingkat produktivitasnya sangat rendah, sehingga terjadi ketidakseimbangan produksi dan ada juga daerah atau sektor yang belum sepenuhnya ikut dalam proses pembangunan, sehingga tidak dapat menikmati hasil-hasilnya. Akibat Negara terkena krisis ekonomi, secara langsung rakyatlah yang mengalami dampaknya, maka untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara berkembang seperti Banglades, Filipina, Pakistan dan Sudan, lembaga keuangan mikro (LKM) yang menjembatannya. Perkembangan lembaga keuangan mikro (LKM) berkembang dengan pesat, LKM digunakan sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan (Amin aziz, 2008).

Data BPS menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2011, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 12,49 persen dari 13,33 persen pada tahun 2010. Gambar 1. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di samping diperoleh melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan.



Gambar 1

Sumber: [BPS](#)

Hasil yang diperoleh pada tahun 2011 dari Klaster I yang ditujukan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar adalah: (1) realisasi penyaluran subsidi Raskin sebesar 2,9 juta ton bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran penerima raskin, dan adanya penyaluran Raskin ke-13 untuk mengurangi beban

pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga-harga pangan, termasuk beras; (2) pemberian pelayanan Jamkesmas bagi 76,4 juta orang; serta (3) penyediaan beasiswa yang direncanakan untuk 4,7 juta siswa.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program Klaster II untuk tujuan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2011 pelayanan PNPM Mandiri Inti sudah dilaksanakan di 6.328 Kecamatan di seluruh Indonesia, dan akan terus dilanjutkan sehingga pada tahun 2012 PNPM Mandiri Inti akan mencakup di 6.623 Kecamatan, dengan penempatan 30.000 fasilitator sebagai pendamping masyarakat dan didukung dengan penyaluran bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 10,31 triliun yang berasal dari APBN dan APBD. Pelaksanaan PNPM Mandiri, juga didukung oleh pelaksanaan PNPM pendukung yaitu diantaranya: (i) PNPM Generasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas generasi penerus; (ii) PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) yang ditujukan untuk memberikan fasilitas bantuan sosial dan akses usaha modal; (iii) PNPM Agribisnis, yaitu Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP); serta (iv) PNPM Pariwisata yang baru masuk dalam PNPM Penguatan dengan tujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. Pelaksanaan PNPM telah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga hingga 19 persen dan konsumsi rumah tangga hingga 5 persen dibandingkan dengan daerah yang tidak mendapat PNPM. Selain itu, akses terhadap kesehatan juga lebih besar 5 persen dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih besar 1,25 persen di lokasi PNPM dibandingkan lokasi non PNPM.

Dalam pelaksanaan Klaster III adalah terlaksananya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dan koperasi. Sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2011 kredit yang tersalurkan hampir Rp 34,42 triliun, dan mencakup sekitar 3,81 juta nasabah dengan tingkat non-performing loan (NPL) mencapai 2,52 persen. Sebagian besar KUR diserap oleh sektor perdagangan, restoran, dan hotel (63,7 persen) dan pertanian (17,1 persen). Penyaluran KUR sebagian besar berada di wilayah Jawa dengan volume KUR sebesar 50,2 persen dan proporsi debitur mencapai 61,0 persen. Pada periode tahun 2011, dana KUR yang disalurkan mencapai Rp 17,23 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,4 juta nasabah. Pelaksanaan KUR telah memberikan dampak terhadap peningkatan rata-rata aset usaha sebesar Rp 51 juta, aset rumah tangga sebesar Rp 12,66 juta dan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 279.000 per bulan. Selain itu, KUR juga telah mengatasi pengangguran terselubung bagi debitur dan keluarganya, serta meningkatkan intensitas utilisasi tenaga kerja dan kontribusi pada perekonomian nasional.

Baik klaster I, II dan III, terlihat bahwa angka kemiskinan tetap masih tinggi, program pemerintah ini belum dikeluarkan angka-angka kebocoran, yang penulis maksud adalah, data angka yang di sampaikan BPS secara riil harus dibuktikan kebenarannya.

Pakar Ekonomi Islam Agustianto Mingka (2010), mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin tercatat sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen). Kriteria miskin tersebut berdasarkan konsumsi masyarakat di bawah Rp 123.000 per bulan. Dengan asumsi sebesar itu, maka buruh yang mendapatkan upah sebesar Rp 450.000 per bulan sesuai dengan KHM (Kebutuhan Hidup Minimum), tidak termasuk dalam kategori miskin. meskipun sesungguhnya mereka adalah kelompok kaum dhu'afa. Berbeda dengan kriteria BPS,

catatan International Labour Organization (ILO), menunjukkan bahwa penduduk yang berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan, dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Sebab, ILO memasukkan sejumlah komponen seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, rekreasi dan kebutuhan lainnya (KHL, kebutuhan hidup layak). Seandainya BPS menggunakan kriteria miskin berdasarkan standar ILO, tentu jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin akan meningkat dua sampai tiga kali lipat dari angka yang disebutkan BPS, atau sekitar 100 juta jiwa. Angka tersebut semakin mendekati kebenarannya, ketika di tahun 2005 ini pemerintah menaikkan harga BBM dengan kenaikan yang tinggi yang berakibat pada naiknya harga-harga kebutuhan hidup dan melejitnya angka inflasi mencapai 18 % lebih.

Jalan keluar yang disampaikan agustianto yaitu untuk mengurangi kemiskinan yang demikian menggurita, diperlukan sebuah gerakan nyata dan implementatif. Salah satu upaya strategis untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah melalui Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang disebut Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Lembaga keuangan ini telah terbukti dapat memberdayakan masyarakat kelas paling bawah (grass root) secara signifikan. Dalam satu dasawarsa pertama (1995 – 2005), di Indonesia telah tumbuh dan berkembang lebih dari 3.300 BMT, dengan asset lebih dari Rp 1 triliun, melayani lebih dari 2 juta penabung dan memberikan pinjaman terhadap 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil. BMT sebanyak itu telah mempekerjakan tenaga pengelola sebanyak 21.000 orang. (Data Pinbuk, 2005).

Di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang berlandaskan Syari'ah, maka sering di sebut Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) BMT.

KONSEP BMT DI INDONESIA

Konsep BMT di Indonesia sudah bergulir lebih satu dekade. Konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian dalam 'mengatasi' (untuk tidak mengatakan mengurangi) permasalahan kemiskinan. Namun dalam beberapa hal konsep ini kadang 'direduksi' oleh pengurus BMT itu sendiri. Konsep yang paling utama dari BMT adalah jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal (Nuryadi, 2010). Pada awalnya BMT adalah salah satu 'proyek unggulan' ICMI. BMT didefinisikan sebagai "lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah". Secara kelembagaan, BMT mendampingi atau mendukung PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang mulai populer. Sebenarnya, PINBUK inilah lembaga primernya, karena mengemban misi yang lebih luas, yakni "menetaskan usaha kecil" BMT adalah hasil inovasi umat Islam Indonesia (Dawam Rahardjo, 1999).

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil*. Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah dana dan baitut tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba (Ridwan, 2004).

Baitul Maaal Wat Tamwil atau pandangan kata dari Balai usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh

kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum miskin (Amin Aziz, 2006). Dalam penelitiannya Euis Amalia (2008) mengatakan bahwa sejak berdirinya, BMT di rancang sebagai lembaga ekonomi, dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah, miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) dalam khazanah keuangan modern, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi.

BMT adalah lembaga ekonomi tingkat mikro dan kecil, yang bukan termasuk koperasi bukan pula bank, tapi berada di tengah-tengah antara kedua lembaga tersebut, yang melayani tabungan maupun pembiayaan dengan system syari'ah. Dalam Anggaran Dasar BMT disebutkan, prinsip-prinsip dasar individu insane BMT adalah secara konsekuen, konsisten dan persisten (*istiqamah*) berpegang pada dan mengembangkan perilaku untuk: bertekad mengubah cara hidup menjadi lebih baik, memperbaiki niat bekerja dan berusaha untuk beribadah kepada Allah, bertekad untuk beribadah lebih sempurna, dan menegakkan disiplin dalam segala hal. Di Indonesia, kemunculan BMT diawali dengan lahirnya BMT Insan Kamil pada tahun 1992, yang antara lain dimotori oleh Aries Mufti, Rizal Muganegara, Iwan Kusuma Hamdan, Zaenal Muttaqin, dan Muhammad Syafii Antonio yang tergabung dalam P3UK (Program Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil). Kemudian Momentum ini dilanjutkan oleh Amin Aziz, Binhadi, dan Zainul bahar Noor dengan lembaga PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis usaha Kecil). Upaya ini terus bergulir dan mendapat momentum pada saat Indonesia mengalami krisis financial sejak 1997 (Antonio, 2010).

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang sasarannya pada ekonomi rakyat berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil. Tujuan utamanya meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan. BMT Berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah, yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil. BMT di percaya oleh rakyat karena BMT terus melayani kebutuhan rakyat kecil bawah (Amin Aziz, 2008).

Dalam konsep Islam yang dioperasionalkan di tingkat desa melalui kegiatan BMT pengelolaan dana sosial (ZIS) ini akan memberikan dampak pada kehidupan sosial ekonomi komunitas. Bagian lain dari BMT adalah Baitul Tamwil (bagian pembiayaan). Dalam konsep baitul tamwil pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah (bagi hasil). Konsep bagi hasil untuk sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep 'lama' dan sudah menjadi bagian dari proses pertukaran aktivitas ekonomi terutama di perdesaan.

Kelebihan konsep bagi hasil ini adalah adanya profit and loss sharing (bagi hasil/rugi) jika dana yang diserahkan ke pengelola BMT digunakan untuk investasi ekonomi. Konsep ini menyebabkan kedua pihak (pengelola BMT dan peminjam saling melakukan kontrol). Dan pengelola dituntut untuk menghasilkan profit bagi penabung dan pemodal.

PROSPEK BMT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

Baitul Maal Wat Tamwil mengalami perkembangan secara signifikan, dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah BMT di Indonesia. Data PINBUK pusat tahun 2011 merilis bahwa jumlah BMT diperkirakan sebesar 5500 BMT. Dalam hubungannya dengan mengatasi masalah kemiskinan, BMT memiliki kelebihan konsep pinjaman kebijakan (*qardhul hasan*) yang diambil dari dana sosial.

Abdul Madjid (2012), mengatakan bahwa model pinjaman kebijakan (*qardhul hasan*) maka BMT tidak memiliki resiko kerugian dari kredit macet yang dialokasikan untuk masyarakat paling miskin. Karena sesuai dengan konsep pemberdayaan maka aktivitas sosial (non profit oriented) seperti pengorganisasian dan penguatan kelompok di tingkat komunitas (jamaah) menjadi langkah awal sebelum masuk pada aktivitas yang mendatangkan profit (seperti pinjaman/pembiayaan). Dua keutamaan inilah yang membuat BMT menjadi sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia (terutama di daerah perdesaan) dewasa ini. Dua sisi pengelolaan dana (Baitul Maal dan Baitul Tamwil) ini seharusnya berjalan seiring, jika salah satu tidak ada maka konsep tersebut menjadi pincang dan menjadi tidak optimal dalam pencapaian tujuan-tujuannya.

Prospek Baitul Maal Wat Tamwil yang menggunakan konsep syari'ah kian bersinar di Indonesia, sebab BMT mampu menarik perhatian masyarakat bahkan lembaga keuangan Internasional. Menurut CEO Permodalan BMT Ventura, Saat Suharto (2009), pertumbuhan mendatang dinilai positif karena melihat dari semakin besarnya apresiasi masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB), Lembaga Penelitian Australia dan Indonesia, dan lembaga lainnya terkait keberadaan BMT di Indonesia.

Dengan berkembangnya BMT di Indonesia, pengusaha kecil dan mikro mulai mendatangi BMT untuk melakukan pembiayaan. Modal dari BMT akan bergulir ke masyarakat kecil, dan akan membuka akses dalam membuka lapangan pekerjaan. Menurut Arum setyowati (2010) mengatakan bahwa kredit mikro/pembiayaan mikro adalah untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang memungkinkan pengusaha kecil peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Kemudian karena BMT menyalurkan kepada pengusaha kecil dan mikro (UMKM) karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja. Sebuah keuntungan strategis dari pembiayaan pada pengusaha kecil dan mikro karena mampu menjadi sarana mensejahterakan rakyat dan mampu untuk mengentaskan kemiskinan.

KESIMPULAN

Di akui atau tidak bahwa problematika ekonomi terbesar terletak pada masalah kemiskinan. Kemiskinan bersifat multi dimensi, karena di dalamnya termasuk, aspek sosial, budaya, bahkan agama. Berbicara kemiskinan erat kaitannya dengan upaya pemerataan pendapatan. Data BPS menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2011, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 12,49 persen dari 13,33 persen pada tahun 2010. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di samping diperoleh melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan. Klaster I yaitu pemenuhan pelayanan dasar, klaster II

pemberdayaan masyarakat dan klaster III tentang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM.

Konsep BMT di Indonesia sudah bergulir lebih satu dekade. Konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian dalam 'mengatasi' (untuk tidak mengatakan mengurangi) permasalahan kemiskinan. Namun dalam beberapa hal konsep ini kadang 'direduksi' oleh pengurus BMT itu sendiri. Konsep yang paling utama dari BMT adalah jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal. Prospek Baitul Maal Wat Tamwil yang menggunakan konsep syari'ah kian bersinar di Indonesia, sebab BMT mampu menarik perhatian masyarakat bahkan lembaga keuangan Internasional. Dan secara riil BMT sudah tersebar diseluruh Indonesia, dengan peran membantu pengusaha mikro dan kecil dalam akses memberikan pembiayaan. Dengan berjalannya pengusaha mikro dan kecil, maka secara tidak langsung membantu membuka lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Bukti inilah, yang semakin mengokohkan bahwa BMT mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul madjid, Tazkia Islamic Finance and Business, 2012
- Ahmad, M. (1995) Business Ethics In Islam, IIIT, Islamabad.
- al-Nawawi, Imam (nd) "Riyadhus-Saleheen," Trans., S. M. M. Abasi, IIPH, Riyadh.
- Amalia, Euis, (2008), *Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Amin, A, Riawan, (2010), *Menggagas Manajemen Syariah*, Salemba Empat, Jakarta
- Amin, A. Riawan (2006), *The Celestial Management*, Senayan Abadi Publising, Jakarta.
- Antonio, M. Syafi'i, (2000), *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institut, Jakarta
- Antonio, M. Syafi'i, (2001), *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Antonio, M. Syafi'i. (2010), *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager"*, Tazkia Publishing, Jakarta.
- Arum Setyowati, anggrek bulan, uns solo, 2010
- Asmi Nur Siwi Kusmiyati, (2007), *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam , Vol 1 No. 1
- Aziz, M.Amin. (2006), *Tata cara pendirian BMT*, Pusat komunikasi Ekonomi Syari'ah, Jakarta
- Aziz, M. Amin. (2007), *Kegigihan sang Perintis*, Pinbuk Press, Jakarta.
- Aziz, M. Amin. (2008), *The Power Al-Fatehah*, Pinbuk Press , Jakarta.
- Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Biklen, (1982), *Qualitative Research for Education: An Introduction ti Theory and Methods*, Boston: Allyn and bacon, Inc.
- Constance, Elise Porter, Naveen Donthu, (2008), *The link between Islamic banking and microfinancing*, Management Science Vol. 54, Iss. 1;
- Data BPS, 2012
- Irawan, Deni Sudrajat. (2008), *Modul Bahan bacaan Pelatihan Dasar Pengelola BMT*, Pinbuk Pusat, Jakarta
- Kelly Pemberton. *Did Yunus Deserve the Nobel Peace Prize. Microfinance or Macromfarce?* Vol. 42, Iss. 2; pg. 435, 9 pgs).
- Masudul Alam Choudhury, Oman Mohammad Shahadat Hossain, Mohammad Solaiman. (2008), *A well-being model of small-scale microenterprise development to alleviate poverty A case study of Bangladesh village*, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 28 No. 11/12, pp. 485-501,

- Masudul, Alam Choudhury, (2002), *Economics. Bradford: Microenterprise development using Islamic financing and organizational instruments: Modality and practicum*, International Journal of Social Economics, Bradford.
- Muhammad, (2008), *Paradigm, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nur Holis. (2008), *Ringkasan Riset Kajian Terhadap Kepatuhan Syariah Dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman*, Yogyakarta, Jurnal Fenomena Volume 6-Nomor 1, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Univervitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
- Nuryadi, Muhammad, (2010), *Baitul Maal wat Tamwil dan Pengentasan Kemiskinan*, MES, Jakarta
- Rahardjo, M.Dawam, (1999), *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ridwan, Muhammad. (2005), *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Pess, Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata. (2008). *Islamic Financial Management, teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*, Rajawali Press, Jakarta
- Wikipedia, (2012).